

## PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Fatimah Elkha

Fatimah.elkha@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine and analyze the effect of internal control, accountability and transparency of regional finance management on local government's performance of Gresik district Regional Device Organization. The research was quantitative. While, the respondents were employees of Gresik district Regional Device Organization. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 130 respondents as sample. Furthermore, the instrument used questionnaires. The questionnaires were distributed directly to respondents. However, there was one questionnaire which missing or did not returned. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with the SPSS 21 application tool (Statistical Product and Service Solution). The research result concluded internal control of regional financial management had positive effect on local government's performance of Gresik district Regional Device Organization. Likewise, accountability had positive effect on local government's performance of Gresik district Regional Device Organization. Similarly, transparency of regional financial management had positive effect on the performance of local governments. In other word, employees of Gresik district Regional Device Organization were able to carry out government tasks optimally. In consequence, they could achieve government organization's objectives in order to have government's performance on the community. Thus, all hypotheses in this research were successfully proven.*

*Keywords: internal control, accountability, transparency, performance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Responden yang digunakan adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 130 responden dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dari 130 kuesioner yang dibagikan terdapat 1 kuesioner yang gugur karena hilang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 21 (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik mampu melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi pemerintah dalam memberikan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti kebenarannya.

Kata kunci: pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, kinerja

### PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif, perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini tentang sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Implementasi otonomi daerah ini dilakukan dengan adanya pengesahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggungjawab pada daerah. Azlina dan Amelia (2014) mengatakan bahwa lahirnya otonomi menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era ini, daerah otonom diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya.

Pemerintah daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang merujuk pada otoritas administratif dan pelayanan di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Seperti halnya Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Riswanto, 2016).

Isu tentang kinerja pemerintah daerah ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik, maka pemerintah juga harus melakukan berbagai cara dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan telah diterima secara umum (Damayanti, 2018).

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Julius, 2018). Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab. Menurut Mardiasmo (2006:3) akuntabilitas diartikan sebagai bentuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan ditingkatnya akuntabilitas publik dan transparansi akan mewujudkan *good corporate governance* yang semakin baik dari tahun ke tahun (Riswanto, 2016). Selain itu, akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja, dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Damayanti (2018) transparansi adalah keterbukaan informasi yang merupakan komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keterbukaan informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi publik. Melalui transparansi, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui rencana kerja dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memberikan *feedback* terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Wiranto, 2017). Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi (Krina, 2003).

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik sesuai dengan harapan publik (Tresnawati, 2013). Tetapi, pada kenyataannya selalu ada saja masalah yang timbul untuk mencapai tujuan organisasi tersebut maka diperlukannya suatu pengendalian yang dapat mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, diperlukan faktor lain yang dapat membantu proses pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi sektor publik yaitu pengendalian internal pemerintah daerah.

Pengendalian intern merupakan kebijakan, prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan dan keuangan (Azlina dan Amelia, 2014). Dibutuhkan pengendalian internal pemerintah agar dapat memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan. Mahmudi (2011), mengatakan bahwa manajemen puncak sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengendalian intern. Dengan pengendalian intern yang baik maka tercipta organisasi/perusahaan yang *economy, efficiency, dan effectiveness* untuk menciptakan *good governance* dalam institusi yang pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi.

Menurut Mahmudi (2011) tuntutan akan kinerja yang baik selalu terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan terbitnya otonomi daerah dan penetapan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah. Kinerja pemerintah harus diinformasikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai tingkat pencapaian hasil kerja, yang dikaitkan dengan misi dan visi suatu organisasi (Julius, 2018). Informasi dilakukan berguna dalam mengambil langkah selanjutnya dengan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan pada program atau kebijakan utama yang akan diambil. Sekaligus pada saat yang bersamaan, informasi dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk bahan perencanaan.

Dengan ini penulis ingin menguji apakah pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Selain itu hasil dari penelitian sebelumnya (Astuti, 2013) menunjukkan hasil/arrah yang bervariasi/belum konsisten mengenai hubungan pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak lagi termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih mengarah pada sasaran hasil utama mereka yang digunakan untuk kepentingan organisasi. Kesuksesan di dalam suatu organisasi dapat menggambarkan maksimalisasi kelompok prinsipal dan manajemen, maksimalisasi kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donalson dan Davis, 1997).

Teori *Stewardship* dalam sistem pemerintahan, pemerintah selaku *steward* bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan *principal* mereka yaitu masyarakat. Pemerintah melakukan segala perencanaan kegiatan dan pengoperasian kegiatan mereka untuk tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat di sini adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan para *steward* guna kepentingan sasaran organisasi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada *principal* dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut pemerintah selaku *steward* mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tetapi, pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah penyelewengan dalam proses pengimplementasiannya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan mengefektifkan pengendalian internal sebagai sistem yang digunakan untuk memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan. Selain pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi

pemerintahan dibutuhkan pula dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya serta tercapainya efektifitas dan efisiensi.

### **Penilaian dan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses yang dilakukan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang (Sigilipu, 2017). Pengukuran kinerja dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena itu informasi yang dihasilkan harus efektif dan efisien. Keefektivitasan suatu informasi tergantung dari cara penyampaian informasi kepada pemimpin, yang menampung setiap informasi dan kemudian akan diolah menjadi informasi yang berguna dalam menilai kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekankan perilaku yang tidak diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja juga penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Sehingga dapat disimpulkan tujuan utama penilaian kinerja yaitu untuk memotivasi pemerintahan dalam mencapai sasaran organisasi dan untuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Nuritomo dan Rossieta (2014) mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2014 kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

### **Pengendalian Internal**

Menurut Winarno (2006:11) menyatakan bahwa untuk mengurangi ancaman dan risiko terhadap sistem informasi akuntansi, diperlakukan sistem pengendalian intern yang dibuat dan dijalankan dengan baik. Menurut Mulyadi (2002:216) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan informasi keuangan, kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi. Tanpa sistem pengendalian intern, sistem akan mudah dirusak dan mudah digunakan orang lain yang tidak berhak.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Akuntabilitas**

Annisaningrum (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan elemen terpenting dalam terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Bentuk perwujudan atas kewajiban suatu instansi pemerintah yaitu dengan mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah yang telah disusun secara periodik. Sehingga, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah akuntabilitas tidak dapat diketahui oleh publik tanpa pemerintahnya sendiri yang memberitahukan kepada rakyat tentang semua informasi yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah.

### **Transparansi**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Annisaningrum, 2010).

Dengan adanya keterbukaan ini, pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu. Sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang, menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

Menurut Mahmudi (2011) pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Penelitian tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah sudah banyak dilakukan oleh Ibrahim (2017), Kewo (2017), Pujiono (2016), dan Putri (2013) yang menyatakan bahwa penerapan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berarti bahwa dengan adanya sistem, pengendalian intern yang sesuai dengan penerapan aturan kerja yang ada maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

#### **Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

Di dalam *good governance* akuntabilitas merupakan elemen terpenting dalam proses untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Sehingga, akuntabilitas secara tidak langsung dapat memberikan peluang positif untuk mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan lagi dalam proses pelaksanaan program serta seluruh kegiatan pengelolaan keuangan untuk dapat dipertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada publik dan *stakeholder*. Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah sudah banyak dilakukan, antara lain

oleh Dewi (2015), Risakotta dan Akbar (2018), Wiguna *et al.*, (2015), Azlina dan Amelia (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah**

Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Fahmi, 2017). Penelitian tentang pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah sudah banyak dilakukan oleh Auditya *et al.*, (2013), Riswanto (2016), Martha (2014), Setiawan dan Safri (2016) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan dengan adanya transparansi masyarakat semakin mudah dalam memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat dinilai, memiliki transparansi yang tinggi. Terlebih lagi, dengan adanya transparansi diharapkan kualitas pelayanan publik semakin bertambah baik. Transparansi yang dilakukan secara baik dan memang benar transparan maka akan memberikan pengetahuan langsung kepada publik dan pengawasan yang lebih baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kinerja pemerintah daerah secara khusus dan umum dapat meningkat sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan diawasi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kasual komparatif. Penelitian kasual komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik selain kecamatan yang mempunyai otoritas dalam proses peningkatan kinerja yang berkaitan dengan pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil mewakili dan diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel tersebut harus betul-betul *representativ* (mewakili). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014: 156).

Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian. Adapun kriteria pemilihan responden yang diambil adalah karyawan yang menjabat sebagai Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan *Staff*. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memberikan 5 kuesioner di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini mengambil populasi pada OPD Kabupaten Gresik selain kecamatan, di mana ada 26 OPD di Gresik. Sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 130 responden.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki otoritas dalam proses peningkatan kinerja pemerintah yang terkait tentang pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Tabel 1  
Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Jumlah Pertanyaan	
Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketaatan terhadap hukum dan peraturan	2	
	Efisiensi dan efektivitas operasi	2	
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas kejujuran dan hukum	2	
	Akuntabilitas proses	3	
	Akuntabilitas program	2	
	Akuntabilitas kebijakan	2	
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab	2	
	Kemudahan akses informasi	2	
	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap	2	
	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan	2	
	Kinerja Pemerintah Daerah	Perencanaan	1
		Investigasi	1
		Pengkoordinasian	1
Evaluasi		1	
Pengawasan		1	
Pemilihan <i>staff</i>		1	
	Negosiasi	1	
	Perwakilan	1	
	Kinerja secara keseluruhan	1	

### Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian internal adalah suatu perencanaan meliputi struktur organisasi dan semua metode yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran variabel pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah di dalam penelitian ini menggunakan indikator kuesioner dari Marzuki (2014) yang diberikan kepada responden dengan beberapa

opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan oleh pemerintah, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Pengukuran variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di dalam penelitian ini menggunakan indikator kuesioner yang diperkenalkan oleh Mardiasmo (2006) dan diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah di dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Krina (2003) yang diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Pengukuran variabel kinerja pemerintah daerah di dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Mahoney dan Jordee (1963) dan diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

### **Teknis Analisis Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2014) analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

#### **Uji Kualitas Data**

##### **Uji Validitas**

Menurut Ghozali (2016:52) uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalihan suatu instrumen atau pernyataan yang ada di kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali (2016:53) menyatakan bahwa uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (uji 2 sisi dengan  $\alpha$  0,05) maka instrumen atau pernyataan dalam kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel (uji 2 sisi dengan  $\alpha$  0,05) maka instrumen atau pernyataan dalam kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).



### Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika masing-masing jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronsbach's Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronsbach's Alpha* > 0,60. Sebaliknya jika nilai *Cronsbach's Alpha* < 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Selain itu untuk menguji normalitas residual dapat dilakukan dengan menggunakan normal *probability plot* yaitu membandingkan distribusi komulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dengan ketentuan bila  $VIF < 10$  maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila  $VIF \geq 10$  maka terdapat masalah multikolinearitas. Bila nilai *Tolerance* > 0,1 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila nilai *Tolerance*  $\leq 0,1$  maka terdapat masalah multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan plot dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2016) yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadinya heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Pengujian dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 0 kenaikan atau penurunan. Metode statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$KPD = \alpha + \beta_1 PIPKD + \beta_2 APKD + \beta_3 TPKD + e$$

Keterangan:

KPD : Kinerja Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

PIPKD : Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah  
 APKD : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah  
 TPKD : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah  
 E : Error

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2016). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Berarti bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Berarti bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat  $\alpha$  sebesar 5%. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen, dan Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian layak untuk menjelaskan variabel dependen.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini terdapat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk skala *likert* untuk masing-masing variabel, baik itu variabel dependen maupun variabel independen. Pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan yang berhubungan dengan Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah (PIPKD), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (APKD), Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD).

Berdasarkan Tabel 2 pada variabel Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah (PIPKD) jumlah responden (N) sebanyak 129, nilai *Mean* sebesar 15,98 dengan tingkat standar deviasi 2,522. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden relatif tinggi. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) jumlah responden (N) sebanyak 129, nilai *Mean* sebesar 35,26 dengan tingkat standar deviasi 3,683. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden relatif tinggi. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) jumlah responden (N) sebanyak 129, nilai *Mean* sebesar 31,74 dengan tingkat standar deviasi 4,055. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden relatif tinggi. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) jumlah responden (N) sebanyak 129, nilai *Mean* sebesar 33,36 dengan tingkat standar deviasi 3,897. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden relatif tinggi.

**Tabel 2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PIPKD	129	7	20	15,98	2,522
AKPD	129	26	44	35,26	3,683
TPKD	129	23	40	31,74	4,055
KPD	129	25	42	33,36	3,897
Valid N (listwise)	129				

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa pernyataan untuk keseluruhan variabel memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Di mana  $r$  tabel dalam penelitian ini adalah 0,1729, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan valid.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$ ( $\alpha = 5\%$ )	Keterangan
Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah	PI_1	0,734	0,1729	Valid
	PI_2	0,787	0,1729	Valid
	PI_3	0,735	0,1729	Valid
	PI_4	0,737	0,1729	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	AKPD_1	0,582	0,1729	Valid
	AKPD_2	0,607	0,1729	Valid
	AKPD_3	0,627	0,1729	Valid
	AKPD_4	0,493	0,1729	Valid
	AKPD_5	0,630	0,1729	Valid
	AKPD_6	0,624	0,1729	Valid
	AKPD_7	0,480	0,1729	Valid
	AKPD_8	0,294	0,1729	Valid
	AKPD_9	0,484	0,1729	Valid
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	TPKD_1	0,713	0,1729	Valid
	TPKD_2	0,825	0,1729	Valid
	TPKD_3	0,680	0,1729	Valid
	TPKD_4	0,670	0,1729	Valid
	TPKD_5	0,854	0,1729	Valid
	TPKD_6	0,541	0,1729	Valid
	TPKD_7	0,239	0,1729	Valid
	TPKD_8	0,861	0,1729	Valid
Kinerja Pemerintah daerah	KPD_1	0,451	0,1729	Valid
	KPD_2	0,670	0,1729	Valid
	KPD_3	0,263	0,1729	Valid
	KPD_4	0,705	0,1729	Valid
	KPD_5	0,673	0,1729	Valid
	KPD_6	0,630	0,1729	Valid
	KPD_7	0,716	0,1729	Valid
	KPD_8	0,491	0,1729	Valid

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa pengukuran data sudah reliabel konsisten.

Tabel 4  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Perhitungan <i>Cronbach's Alpha</i>	Koefisien <i>Alpha (a)</i>	Keterangan
PIPKD	0,738	0,60	Reliabel
APKD	0,686	0,60	Reliabel
TPKD	0,824	0,60	Reliabel
KD	0,706	0,60	Reliabel

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

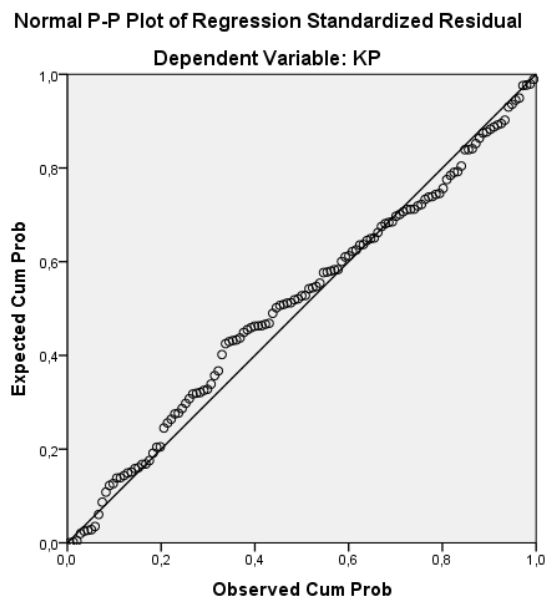
## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 5  
Hasil Uji Normalitas  
*One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		129
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	,29810595
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,091
	<i>Positive</i>	,050
	<i>Negative</i>	-,091
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,030
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,239

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* bernilai 1,030 dengan nilai signifikansi 0,239 yang berarti bahwa variabel penelitian lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian. Sedangkan untuk uji normal *P-P Plot* dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1  
Uji Normal *P-P Plot*  
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal dan menyebar di sekitar garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas**

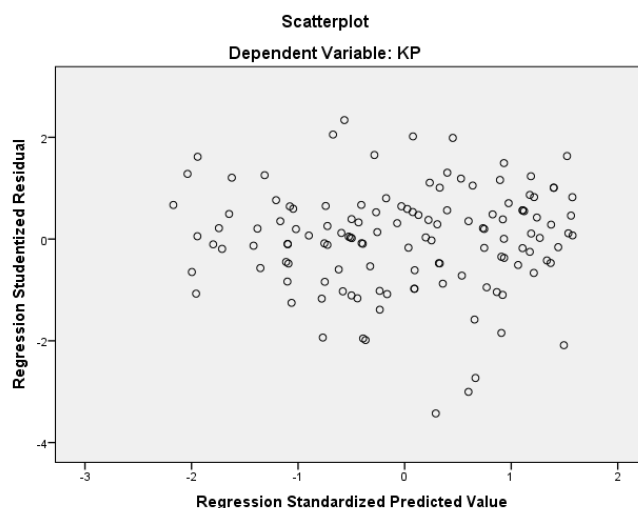
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PIPKD	0,861	1,162	Tidak terjadi multikolinieritas
AKPD	0,861	1,161	Tidak terjadi multikolinieritas
TPKD	0,786	1,272	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 6 dapat menunjukkan ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 grafik *scatterplot* pada uji asumsi heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
 Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,561	,297		1,889	,061
	PIPKD	,235	,046	,342	5,149	,000
	APKD	,188	,070	,178	2,679	,008
	TPKD	,371	,059	,434	6,247	,000

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 7 maka prediksi Kinerja Pemerintah Daerah dapat dimasukkan dalam model regresi sebagai berikut:

$$\text{KPD} = \alpha + \beta_1\text{PIPKD} + \beta_2\text{APKD} + \beta_3\text{TPKD} + e$$

$$\text{KPD} = 0,561 + 0,235\text{PIPKD} + 0,188\text{APKD} + 0,371\text{TPKD} + e$$

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 8  
Hasil Uji t

Hubungan Variabel	Standardized Coefficient	t	Sig. value	Keterangan
PIPKD-KPD	0,342	5,149	0,000	Signifikan
APKD-KPD	0,178	2,679	0,008	Signifikan
TPKD-KPD	0,434	6,247	0,000	Signifikan

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan uji pada Tabel 8 dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif sebesar 0,342 dan *sig. value* sebesar (0,000) < *sig. tolerance* (0,05). (b) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif sebesar 0,178 dan *sig. value* sebesar (0,008) < *sig. tolerance* (0,05). (c) Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif sebesar 0,434 dan *sig. value* sebesar (0,000) < *sig. tolerance* (0,05).

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 9  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,620	3	4,207	46,227	,000 <sup>b</sup>
	Residual	11,375	125	,091		
	Total	23,995	128			

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Tabel 9 menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan layak untuk penelitian karena dalam hasil yang ditunjukkan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (5%). Sehingga seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi *R-Square* sebesar 0,526 atau 52,6%. Maka ini menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen. Artinya pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen sebesar 52,6%. Sedangkan sisanya yang sebesar 47,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang telah digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 10  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,725 <sup>a</sup>	0,526	0,515	0,30166

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengendalian internal yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Gresik, maka kinerja pemerintah akan semakin meningkat. Pelaksanaan pengendalian internal sangat bergantung pada penguatan sistem pengendalian internal yang sudah dibangun. Pengendalian internal merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan di dalam memberikan pelayanan publik bagi kemajuan OPD khususnya di dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kepala daerah/pusat.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibrahim (2017), Kewo (2017), Pujiono (2016), dan Putri (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya pengendalian internal dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja individu dalam pemerintah daerah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden melalui kuisioner yang dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal sangat baik. Sebab dengan adanya sistem yang tersedia dapat diterapkan sesuai fungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam hal memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik bentuk pertanggungjawaban pemerintah OPD Kabupaten Gresik maka kinerja pemerintah OPD akan meningkat. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan laporan kinerja dengan cara mampu menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kinerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2015), Risakotta dan Akbar (2018), Wiguna *et al.*, (2015), Azlina dan Amelia (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan. Semakin baik bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas mempengaruhi kinerja pemerintah dalam proses pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan bahwa akuntabilitas publik telah melaksanakan kegiatan anggaran dengan baik, memprogram anggaran, melaksanakan program anggaran, mengalokasikan dana anggaran sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pemerintah juga bertanggungjawab terhadap peningkatan anggaran melalui kinerja kepada masyarakat luas.

## **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik transparansi yang diterapkan oleh pemerintah OPD Kabupaten Gresik, maka kinerja pemerintah semakin meningkat. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Akses untuk memperoleh informasi sangatlah penting dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Auditya *et al.*, (2013), Riswanto (2016), Martha (2014), Setiawan dan Safri (2016) yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin mudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintah tersebut dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Pemerintah daerah juga sudah melibatkan masyarakat dan organisasinya dalam proses pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan. Sehingga masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Populasi penelitian ini adalah karyawan di OPD Kabupaten Gresik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan membagikan kuesioner pada setiap OPD Kabupaten Gresik. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai penelitian untuk memperoleh sampel. Telah didapatkan sampel total sebesar 129 orang dengan 57 responden berjenis kelamin laki-laki dan 72 responden berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil pengujian menunjukkan Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah OPD akan semakin meningkat. Begitu pula hasil pengujian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik bentuk pertanggungjawaban pemerintah maka kinerja pemerintah OPD akan meningkat. Sedangkan hasil pengujian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi yang diterapkan oleh pemerintah OPD maka kinerja pemerintah semakin meningkat.



## Saran

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun pada dasarnya dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan. Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mendapatkan data dengan cara membagikan kuesioner terhadap responden. Jawaban kuesioner terkadang tidak mewakili jawaban responden atau bisa dibilang jawaban yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya sehingga bisa mempengaruhi hasil penelitian. Lalu Penyebaran kuesioner pada beberapa OPD Kabupaten Gresik masih memiliki kendala dalam pengisian kuesioner. Kuesioner yang diberikan peneliti tidak dapat langsung diisi dan harus ditinggal karena proses disposisi. Terkadang karena kesibukan responden, kuesioner lupa untuk diisi sehingga harus selalu menanyakan atau mengingatkan.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dari simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan dengan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Saran merupakan suatu masukan agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya. Karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi. Begitu pula untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel, yakni dengan menggunakan seluruh organisasi perangkat daerah yang dijadikan objek penelitian. Sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja secara menyeluruh. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan indikator lain sesuai dengan yang diperlukan serta mampu berinovasi dengan kuesioner yang sesuai dengan kondisi penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang lebih rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. <http://ovy19.wordpress.com>. Diakses Tanggal 23 Oktober 2019.
- Astuti, R. M. 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 12(2):110-125.
- Auditya, L., Husaini, dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* 3(1): 21-41.
- Azlina, N. dan I. Amelia. 2014. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi* 12(2): 32-42.
- Damayanti, E. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Dewi, R. T. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Jurnal Trikonometrika* 14(1).
- Donalson, L. dan J. H. Davis. 1997. Stewardship Theory or Agency Theori: CEO Governance dan Shareholder Returns. *Australian Journal of Management* 16: 49-64.
- Fahmi, A. N. 2017. Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Kependudukan di Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Cetakan Keempat. BP Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ibrahim, M. 2017. Effects of Internal Control, Corporate Governance, Organizational Culture, and Management Audit on Managerial Performance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Economic Perspectives* 11(3): 1826-1832.
- Julius, P. 2018. Akuntabilitas: Menuju Indonesia Berkinerja. <https://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja>. Diakses Tanggal 12 November 2019.
- Kewo, C. L. 2017. The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *Journal of Economics and Financial Issues* 7(1): 293-297.
- Krina, P. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahoney, T. dan T. H. Jordee. 1963. *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Southwestern Publishing. Cincinnati.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1).
- Martha, W. 2014. Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung (Survey di Instansi Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi* 2(1).
- Marzuki. 2014. Pengaruh Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar). *Publikasi Ilmiah*. Universitas Abulyama. Aceh.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Nuritomo dan Rossieta. 2014. Politik Dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 25 Tahun 2012, *Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- \_\_\_\_\_. Nomor 60 Tahun 2008, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pujiono, D. S., H. Sukarno, dan N. Puspitasari. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Povinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 10(1): 68-81.
- Putri, G. Y. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Jurnal Akuntansi* 1(1).
- Risakotta, K. A. dan R. Akbar. 2018. The Effect of Internal and External Accountability, Job Motivation and Education on Local Government Official's Performance. *Journal of Indonesian Economy and Business* 33(3): 257-272.
- Riswanto, N. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi* 14(2): 1-7.
- Setiawan, H. E., dan M. Safri. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Saruan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4(1): 51-72.
- Sigilipu, S. 2017. Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal EMBA* 1(3): 239-247.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tresnawati, R. 2013. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional*. Universitas Widyatama: 139.

- Wiguna, M. B. S., G. A. Yuniartha, dan N. A. S. Darmawan. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi* 3(1).
- Winarno, W. W. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi kedua. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Wiranto, T. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. <http://www.depkominfo.go.id>. Diakses Tanggal 24 Oktober 2019.